

**RESENSI BUKU**  
**Memanusiatekan Rakyat**

*Umi Listyaningsih*

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang menuntut penanganan yang komprehensif. Kemiskinan dapat dinyatakan sebagai lemahnya kapabilitas, lemahnya kelembagaan, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Aspek tersebut saling terkait dan merupakan sistem kemiskinan; artinya, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, aspek tersebut akan menjadi penyebab maupun akibat dari aspek yang lain. Fenomena kemiskinan yang sistematis ini dipengaruhi oleh struktur dan kultur sosial. Struktur sosial feodalistik dan nilai-nilai fatalistik yang tidak kondusif bagi perkembangan jiwa kewirausahaan, seperti *nrimo* menjadi persoalan sendiri dalam penanggulangan kemiskinan. Masalah kemiskinan tidak dapat direduksi secara sederhana dengan meningkatkan pendapatan melalui pemberian kesempatan kerja dan upah.

Kondisi kemiskinan cukup bervariasi dari tingkat yang paling ringan, yakni hampir miskin, sampai sangat miskin. Perbedaan status ekonomi sangat miskin, miskin, dan hampir miskin yang digunakan sebagai dasar penentuan sasaran bantuan hanya dapat dilihat dalam tataran konsep, namun dalam implementasinya, perbedaan status tersebut tidak signifikan sehingga sulit untuk ditemukeni. Kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan terhadap aparat desa sebagai ujung tombak pendistribusian bantuan menjadi dasar terjadinya konflik antarmasyarakat maupun antara masyarakat dengan pelaksana tingkat bawah. Akibatnya, bantuan didistribusikan secara merata pada semua masyarakat, baik yang berhak menerima maupun tidak. Dengan kata lain, niat pemerintah membantu rakyat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tidak sepenuhnya tepat sasaran.

Kompleksnya permasalahan penanggulangan kemiskinan tersebut menggugah pikiran Muhadjir Darwin untuk memberikan sumbangsih melalui buku *Memanusiatekan Rakyat* sebagai upaya penanggulangan

kemiskinan dengan memperhatikan hak-hak rakyat yang diterbitkan Benang Merah. Buku ini terbagi dalam 6 bab dan pembahasan memanusiasikan rakyat diawali dengan Bab 1 tentang telaah teoretis kemiskinan. Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu konstruksi sosial atas suatu realitas sosial yang kompleks. Situasi kemiskinan dikonstruksikan secara berbeda-beda oleh para ahli dan praktisi kebijakan tergantung ideologi yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. Situasi dan derajat kemiskinan dikaji secara mendalam, namun belum diungkapkan secara lengkap model pengukuran kemiskinan mulai dari *basic need*, Kebutuhan Fisik Minimum, Kebutuhan Hidup Minimum, model keluarga sejahtera dari BKKBN, hingga model pembangunan manusia berupa indeks kemiskinan manusia yang dikeluarkan UNDP.

Gambaran situasi global dan komitmen nasional dalam merespons persoalan kemiskinan dibahas dalam Bab 2 tentang komitmen nasional terhadap upaya penanggulangan kemiskinan sejak tahun 1970 sampai sekarang. Berdasarkan kritik pengamat kemiskinan, dalam perjalanannya telah terjadi perubahan dan penyesuaian model penanggulangan kemiskinan. Bab ini memberikan gambaran terbatasnya ruang pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan karena tidak didukung anggaran yang memadai sehingga menimbulkan kesan ketidakseriusan pemerintah terhadap masalah tersebut. Program penanggulangan kemiskinan masih sebagai “program lipstik” di tengah kebijakan pembangunan secara umum.

Pembangunan dengan pendekatan *top down* yang mendefinisikan pengurangan kemiskinan dapat dilakukan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga tinggi (*trickle down*). Aliran pembangunan propertumbuhan yang dikaji dalam Bab 3 tersebut dipertentangkan dengan aliran pembangunan prorakyat. Paradigma pemberdayaan masyarakat berkembang menjadi paradigma pengarusutamaan kemiskinan yang meletakkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai arusutama dari seluruh proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan secara keseluruhan berorientasi pada atau bermanfaat bagi orang miskin (*Pro Poor Development*). Upaya penanggulangan kemiskinan harus tercermin dalam semua kebijakan, baik kebijakan ekonomi, sosial, politik, hukum,

atau keamanan. Paradigma pembangunan dalam mengatasi kemiskinan dirangkum dalam Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Pergeseran Paradigma Pembangunan dalam Penanganan Masalah Kemiskinan**

Paradigma Pembangunan	Asumsi	Pendekatan	Posisi orang miskin	Masa penerapan
Pertumbuhan	Kemiskinan akan dengan sendirinya teratasi jika pertumbuhan ekonomi terjaga tinggi ( <i>trickle down</i> )	<i>Top down</i>	Dampak samping	Repelita I-II
Pertumbuhan dengan pemerataan	Pertumbuhan tidak cukup. Perlu ada kebijakan distributif dan redistributif untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin	<i>Top down</i>	Objek	Repelita III-IV
Pemberdayaan masyarakat	Orang miskin harus diberdayakan dan dilibatkan dalam proses pembangunan dan dihargai hak-hak dasarnya sebagai warga negara ( <i>participatory &amp; emancipatory</i> )	<i>Bottom up</i>	Subjek	Repelita V-VI
Pengarus-utamaan kemiskinan	Seluruh kegiatan pembangunan, baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun keamanan harus berorientasi pada penanggulangan masalah kemiskinan	<i>Bottom up</i> dan kolaboratif	Subjek	Saat ini dan ke depan

Restrukturisasi semua komponen tersebut merupakan salah satu cara untuk mengembalikan hak asasi manusia yang hilang. Strategi nasional penanggulangan kemiskinan mendefinisikan kemiskinan sebagai masalah hak-hak dasar manusia yang paling mendasar. Bab 4 dari buku ini menguraikan kemiskinan yang mustahil dapat ditanggulangi tanpa ada realisasi terhadap hak-hak dasar manusia. Semua orang berhak memperoleh penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan atas hak-hak mereka dan terbebas dari berbagai bentuk pengingkaran hak-hak dasar manusia. Tanggung jawab yang timbul dari hak ini adalah munculnya tugas menghargai, melindungi, dan memenuhi. Institusi negara, bisnis, dan masyarakat mempunyai tugas yang sama dalam hal ini. Untuk itu, dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, perlu ada

pendekatan akuntabilitas, persamaan, partisipasi, serta keterkaitan dan saling ketergantungan.

Dalam Bab 5 dibahas beberapa hal penting dalam implementasi kebijakan sosial. Kebijakan sosial akan terealisasi tepat sasaran jika ada dukungan dari seluruh komponen yang ada, yakni negara, masyarakat, dan pihak swasta atau bisnis, sebagai pilar penyangga penanggulangan kemiskinan. Perluasan kesempatan, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan sosial, dan penataan kemitraan sosial merupakan pilar strategi nasional penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, menurut Gerakan Anti Kemiskinan Rakyat Indonesia, pilar yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan adalah restrukturisasi relasi politik, redistribusi kekayaan dan aset negara, reorientasi ekonomi rakyat, dan reformasi peran donor. Dengan kata lain, kemiskinan harus didekati melalui penerapan strategis yang juga komprehensif sehingga upaya penanggulangan kemiskinan mewarnai seluruh sektor pembangunan.

Kebijakan sosial yang perlu segera dituntaskan sebagai unsur penting pemutusan rantai kemiskinan misalnya, adalah pemenuhan kebutuhan pokok, akses terhadap kehidupan yang layak, akses terhadap beberapa fasilitas dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, serta penanganan persoalan kependudukan dan lingkungan. Pencermatan permasalahan pada setiap sektor kebijakan serta kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dikupas secara mendalam pada Bab 6.

Kajian ilmiah yang sudah mendalam akan lebih bermakna jika disertai dengan data-data aktual persoalan kemiskinan. Misalnya karakteristik penduduk miskin, kondisi geografis, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan termasuk efektivitas pelaksanaannya, serta sejauh mana keterlibatan swasta dalam merespons persoalan kemiskinan. Meskipun buku ini tidak begitu tebal, terdiri dari 87 halaman dengan ukuran panjang 21 cm dan lebar 15 cm, kajian dan pembahasannya mendalam ditambah dengan ulasan bahasa yang relatif mudah untuk dicerna. Dengan demikian, sungguh penting bagi pihak-pihak yang menginginkan sebuah perubahan terhadap hak-hak manusia agar terwujud masa depan yang lebih humanis untuk memiliki buku ini.

## DAFTAR PENULIS

**Basilica Dyah Putranti, S.Sos., M.A.**, dilahirkan di Yogyakarta, tanggal 11 Agustus 1971. Menyelesaikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada (1997), dan memperoleh gelar M.A. di bidang Sosiologi dari Ateneo de Manila University, the Phillipines (2001). Basilica memiliki perhatian yang mendalam terhadap studi gender, terutama aspek politik-kebudayaan dari gender. Selama lebih dari 5 tahun ini ia melakukan penelitian, menulis, dan menjadi editor artikel/buku tentang isu-isu yang terkait dengan kekerasan berbasis gender, seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta gender, konflik dan pengungsi.

**Endang Ediastruti, Dra., M.Si.**, staf peneliti pada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada serta staf pengajar di beberapa perguruan tinggi swasta. Bidang studi yang diminati adalah analisis demografi, estimasi, dan proyeksi. Saat ini sedang melakukan penelitian pemberdayaan pengangguran dan setengah pengangguran bersama Tukiran dan Agus Joko Pitoyo.

**Muyanja Ssenyonga** menyelesaikan BA (Hons) di Mbale University, Uganda, menyelesaikan program master pada bidang Manajemen Keuangan dan memperoleh gelar doktor di bidang Ekonomi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini Muyanja mengikuti program magang peneliti di Pusat Studi Asia Pasifik, Universitas Gadjah Mada. Bidang studi yang diminati adalah manajemen keuangan, kredit, inovasi, dan manajemen pengetahuan.

Holds a Bachelor of Arts BA (Hons), Mbale University, Uganda. Holds a Master of Science Degree (Majoring in Financial Management) and a Doctorate in Agricultural Economic of the Graduate Studies Program Gadjah Mada University, Yogyakarta. Currently is a practical research student at Center for Asia and Pacific Studies, GMU. Research interests in financial management, credit, innovation, and knowledge management.

### *Daftar Penulis*

**Sukamdi, Drs., M.Sc.**, adalah staf pengajar di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Menyelesaikan program master di bidang demography di Florida State University, Florida, USA, tahun 1990. Ia juga mengikuti berbagai training dan workshop bertaraf regional dan internasional di bidang kependudukan, pengembangan regional, di Jepang, Thailand, Singapura, dan USA. Selain aktif menulis artikel dalam jurnal dan buku ilmiah, juga terlibat dalam beberapa penelitian di bidang ketenagakerjaan, migrasi, kemiskinan, dan krisis. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

**Tukiran, Drs., M.A.**, staf pengajar pada Jurusan Geografi Manusia, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dan staf peneliti pada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Bidang kajian yang diminati adalah studi kependudukan, utamanya pembangunan sumber daya manusia, ketenagakerjaan, kemiskinan, mobilitas penduduk, demografi formal (estimasi dan proyeksi), sekaligus sebagai Ketua Penyunting Jurnal *Populasi*.